



Meningkatkan Ekonomi Petani Kopi Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Jeri Fitrianto^{1*}, Dang Eif Saiful Amin²

^{1,2}Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : 19jerrief@gmail.com

ABSTRAK

Dalam konteks tersebut, peran lembaga lokal seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menjadi sangat penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya, proses, dan hasil Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani kopi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani kopi di Desa Mekarmanik telah melalui tiga tahap pemberdayaan, yaitu enabling, empowering, dan protecting. Model pemberdayaan yang diterapkan berbasis kemitraan antara Perum Perhutani dengan LMDH Tani Mukti Giri Jaya melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani kopi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hutan. Dengan demikian, kemitraan berbasis PHBM terbukti menjadi model pemberdayaan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat; Ekonomi; LMDH.

ABSTRACT

In this context, the role of local institutions such as the Forest Village Community Institution (LMDH) becomes very important in promoting the economic empowerment of forest communities through the sustainable management of natural resources. The purpose of this study is to identify the efforts, processes, and outcomes of LMDH in improving the economic conditions of coffee farmer groups. This research uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation studies, while data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that coffee farmers in Mekarmanik Village have gone through three stages of empowerment: enabling, empowering, and protecting. The empowerment model applied is based on a partnership between Perum Perhutani and LMDH Tani Mukti Giri Jaya through the Community-Based Forest Management (PHBM) program. This program not only increases the income of coffee farmers but also strengthens economic independence, social solidarity, and environmental awareness toward forest conservation. Thus, the PHBM-based partnership has proven to be an effective, participatory, and sustainable empowerment model for communities living around the forest.

PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia merupakan suatu habitat dari spesies flora dan fauna penting dunia, dan secara ekonomi dari tahun 1980-an sumber daya hutan banyak memberikan sumbangan terhadap peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) Indonesia yang cukup pesat. Kawasan hutan memiliki klasifikasi tiga fungsi yaitu: Hutan Produksi (HP), dengan areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari kawasan hutan; Hutan Konservasi (HK) dengan areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari kawasan hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung (HL) yang memiliki fungsi perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Hutan di Pulau Jawa memiliki peran yang sangat penting sebagai penyangga ekosistem, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Hutan bukan hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida, tetapi juga menjaga keseimbangan hidrologi, mencegah erosi, serta melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Namun demikian, keberadaan hutan-hutan di Pulau Jawa saat ini menghadapi tekanan yang sangat besar akibat peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan berbagai sektor, seperti pertanian, permukiman, dan industri. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali telah menyebabkan berkurangnya luas hutan secara signifikan, sehingga fungsi ekologis hutan semakin terancam.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap sumber daya hutan. Mereka memanfaatkan hasil hutan kayu maupun non-kayu seperti rotan, getah, madu, bambu, dan tanaman obat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, muncul tuntutan agar hutan di Pulau Jawa tidak hanya berperan secara ekologis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau Perhutanan Sosial, yang bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Melalui pendekatan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan.

Namun, tantangan besar tetap ada dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi tersebut. Ketika tekanan terhadap lahan semakin meningkat, banyak masyarakat yang terpaksa membuka lahan hutan untuk pertanian atau kebutuhan tempat tinggal, sehingga memperparah deforestasi. Di sinilah pentingnya peran lembaga seperti Perhutani, yang bekerja

sama dengan masyarakat melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanam komoditas bernilai ekonomi di bawah tegakan pohon hutan, seperti kopi, jahe, atau empon-empon, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan tanpa harus merusak hutan.

Selain itu, pengelolaan hutan di Pulau Jawa juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan jangka panjang. Artinya, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan di kawasan hutan harus tetap memperhitungkan daya dukung lingkungan. Prinsip ekonomi hijau (*green economy*) menjadi penting diterapkan agar aktivitas manusia di sekitar hutan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengurangi fungsi ekologisnya. Upaya konservasi, rehabilitasi lahan kritis, serta pendidikan lingkungan bagi masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar kesadaran akan pentingnya menjaga hutan semakin tumbuh.

Dengan demikian, hutan di Pulau Jawa memiliki posisi yang sangat strategis dan multidimensi. Ia bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sosial-ekonomi yang harus dikelola dengan bijaksana. Keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian ekologis menjadi kunci utama agar hutan tetap berfungsi optimal. Jika dikelola secara berkelanjutan dan partisipatif, maka hutan-hutan di Pulau Jawa dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai penjaga keseimbangan alam bagi generasi sekarang dan mendatang.

Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan mandat, Perum Perhutani memiliki tugas mengelola hutan produksi milik negara sejak tahun 1972. Yang pada awalnya Perhutani menggunakan konsep pengelolaan hutan produksi yang lebih bersifat *timber oriented*, sehingga masyarakat sekitar hutan kurang dilibatkan dalam konsep pengelolaan ini. Dengan kata lain variabel sosial ekonomi dan budaya kurang diperhitungkan oleh Perhutani. Dan hal ini menyebabkan timbulnya gesekan antara Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. Setelah evaluasi dilakukan, metode baru muncul dengan menekankan pada peranan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan produksi dengan kesepakatan.

Metode baru pengelolaan sumber daya hutan yang lebih berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui kesepakatan berbagi hasil, berbagi peran, dan berbagi tanggung jawab merupakan konsep yang digunakan oleh program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Perhutani mulai menjalankan program ini pada tahun 2001, dengan memasukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan program. Oleh karena itu, pada program PHBM ini sangat melibatkan Masyarakat Desa Hutan (MDH). Dengan adanya program PHBM ini di harapkan menghasilkan *win-win solution* bagi kedua belah pihak yaitu adanya penyerapan tenaga kerja, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan sumber daya manusia. Selain itu kemitraan antara Perhutani dengan

masyarakat desa hutan menstimulasi kesadaran akan pentingnya hutan di tengah kehidupan sosial. Program PHBM ini bermitra dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang baik jika dibandingkan dengan tanaman perhutanan. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 tahun 2013 terkait program penyelenggaraan perkebunan. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang mempunyai pasar luas di dalam maupun luar negeri, dan juga telah meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Di Desa Mekarmanik Kec. Cimenyan Kab. Bandung terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang diberi nama Tani Mukti Giri Jaya. Lembaga ini mengembangkan budidaya bibit kopi di lahan Perhutani dan merintis kerja sama dengan Perhutani sejak tahun 2006 dan mulai efektif pada awal tahun 2020. Di dalam kelompok ini terdapat 6 kelompok tani hutan dengan beranggotakan 343 orang dengan luas lahan 135,48 hektar. Jenis kopi yang dikembangkan adalah kopi arabika dengan jenis bibit kopi sigarar utang.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sama membahas mengenai usaha dalam meningkatkan ekonomi, yaitu diantaranya, *pertama* penelitian yang dilakukan oleh Bagaskara (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan lembaga yang terjadi pada saat kepengurusan sebelumnya saat ini sudah mulai dibenahi dan melangkah untuk rencana jangka panjang dari lembaga tersebut. Dari aspek pemanfaatan hutan terdapat tiga poin utama yaitu sebagai faktor pendorong, dampak, dan kendala. Faktor pendorong memiliki sumber daya alam luas, dampak dari didirikannya lembaga tersebut masyarakat desa hutan mendapatkan akses untuk memanfaatkan lahan di kawasan Perum Perhutani, dan kendala dari program tersebut sering terjadi miss komunikasi internal antara lembaga dan kelompok tani. Aspek Kelembagaan menunjukkan bahwa LMDH berkoordinasi dengan kantor desa dan Perum Perhutani untuk mengelola hutan bersama masyarakat. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Wahanisa (2015). Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal dilakukan mengikutsertakan masyarakat, dengan model PHBM, peran dan partisipasi masyarakat dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/ Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), hambatan, kurang cepat mengakses informasi dengan berbagai kendala. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ariviyah (2016). Berdasarkan hasil penelitian, LMDH di Desa Palimanan Barat belum berjalan secara maksimal baik dalam kepengurusan lembaganya maupun dalam hasil pengelolaan hutan yang didapatkan oleh petani hutan, sehingga keberadaan LMDH ini belum sepenuhnya menjadi penopang kebutuhan hidup untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Dari uraian penelitian terdahulu diatas, maka penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai usaha dalam meningkatkan ekonomi, namun perbedaannya peneliti akan mendeskripsikan

tentang usaha dan proses yang dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam meningkatkan ekonomi petani kopi di Kp. Arcamanik beserta hasil yang dirasakan oleh petani kopi dari usaha yang telah dilakukan oleh LMDH.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menjelaskan serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran LMDH dalam meningkatkan ekonomi petani kopi di Kp. Arcamanik. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara bersama Tatang Rohmat selaku sekretaris LMDH, Yadi Supriadi selaku ketua LMDH, dan Otin Hidayat selaku ketua kelompok tani kopi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021. Sedangkan data sekundernya berupa data Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan antara Perum Perhutani KPH Bandung Utara dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tani Mukti Giri Jaya.

LANDASAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori upaya pemberdayaan masyarakat menurut Ginanjar (1995), yang menekankan bahwa pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu enabling, empowering, dan protecting. Pertama, enabling berarti menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Tahap ini berfokus pada penghapusan berbagai hambatan struktural maupun kultural yang membatasi kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kedua, empowering mencakup upaya memperkuat kemampuan, potensi, dan daya yang dimiliki oleh masyarakat agar mereka dapat mandiri, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Proses ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya dan peluang. Ketiga, protecting berarti memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok yang rentan, dari praktik-praktik eksploitatif dan ketidakadilan sosial yang dapat menghambat proses pemberdayaan. Ketiga tahap tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah kehidupannya sendiri. Dengan demikian, teori Ginanjar menjadi dasar penting dalam memahami strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan.

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soerjono Soekanto (2012) dalam buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara

kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Sebagaimana dengan kedudukan, peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang mempunyai kepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. (Abidin, 2008)

Kelompok tani dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu wilayah keluarga atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani. Kelompok tani biasanya dipimpin oleh seorang ketua kelompok, yang dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat diantara

Meningkatkan Ekonomi Petani Kopi Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) anggota kelompok tani. Pada waktu pemilihan ketua kelompok tani sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi kelompok tani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Mekarmanik merupakan salah satu desa di Jawa Barat yang berlokasi di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung berdiri sejak tahun 1982. Luas desa 790,31 Ha dengan ketinggian tanah 600-1.200 mdpl. Rata-rata curah hujan per tahun Desa Mekarmanik 2.100 mm. Sedangkan, luas hutan di Desa Mekarmanik hampir separuh dari luas desa tersebut. Berdasarkan luas pembagian wilayah desa, yaitu diantaranya sebelah utara merupakan Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, sebelah selatan merupakan Desa Sindang Laya, Kecamatan Cimenyan, sebelah timur merupakan Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, dan sebelah barat merupakan Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Mekarmani masih tergolong rendah, hal ini bisa terlihat dari sedikitnya orang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, maka dari itu perlu adanya upaya-upaya yang konkrit dari berbagai elemen masyarakat termasuk pemerintah Desa Mekarmanik sebagai instrumen penting bagi kemajuan suatu daerah guna membangun sumber daya manusia yang berkualitas maka pendidikan adalah modal utama, sehingga dapat membantu masyarakat memecahkan setiap persoalan yang dihadapi.

Penduduk Desa Mekarmanik secara umum bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menampung mata pencaharian masyarakat Desa Mekarmanik. Jarak antara dusun di Desa Mekarmanik relatif tidak dekat, hal ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.

Awal mula terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sekitar tahun 2006 yang beriringan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan mulai efektif pada awal tahun 2020. Luas lahan Perum Perhutani yang dimanfaatkan oleh LMDH Desa Tani Mukti Girijaya seluas 135,48 hektar area yang beranggotakan kurang lebih 343 anggota di dalamnya terdapat 6 Kelompok Tani Hutan, diantaranya 5 KTH komoditas kopi dan 1 KTH komoditas bambu.

LMDH Tani Mukti Giri Jaya merupakan wadah agi masyarakat desa hutan untuk mengembangkan pengelolaan hutan. Lembaga LMDH menjembatani masyarakat dalam perizinan pengelolaan lahan di kawasan hutan milik perum perhutani melalui kerjasama antara perum perhutani dengan LMDH.

Hasil penelitian ini menemukan usaha yang dilakukan LMDH untuk meningkatkan ekonomi petani kopi, proses LMDH dalam meningkatkan ekonomi petani kopi, dan hasil yang diperoleh dari usaha LMDH dalam upaya meningkatkan ekonomi petani kopi.

Usaha LMDH dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Kopi

Usaha yang dilakukan LMDH dalam meningkatkan ekonomi petani kopi adalah dengan menjalankan suatu program Perhutani yang dinamakan dengan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Dari berbagai momentum dari skala dunia hingga nasional berdampak terhadap keberlangsungan di Desa Mekarmanik dalam pengelolaan hutan yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara (KBU) terdapat sekitar 596, 40 ha luasan hutan di desa tersebut atau sekitar 50% luas desa tersebut merupakan hutan. Hal ini perlu dimanfaatkan untuk melahirkan kebermanfaatan bersama bagi masyarakat. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) lahir untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah dan masyarakat desa hutan dalam mengelola lahan pemerintah yang berada di kawasan tersebut. Salah satu inisiator awal pendirian LMDH di Desa Mekarmanik yaitu Pak Tamid yang merupakan salah satu mantan pegawai Perum Perhutani sekaligus warga Desa Mekarmanik.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dengan memberikan akses kepada masyarakat desa hutan dalam memanfaatkan kawasan hutan guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat desa hutan untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Maka, idealnya peran LMDH dapat membantu keterlibatan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan.

Kondisi LMDH Tani Mukti Giri Jaya pada saat awal tahun 2020 sedang mengalami kekosongan kepemimpinan di dalam organisasi tersebut. Hal ini disebabkan ketua LMDH yang sedang menjabat pada saat itu meninggal dunia. Selain itu, ada saran dari masyarakat kepada pihak kantor desa untuk memfasilitasi pemilihan ketua LMDH untuk membuat panitia pemilihan ketua LMDH dengan melibatkan elemen masyarakat. Beberapa aspirasi telah disampaikan oleh masyarakat desa terhadap pemangku kepentingan di kantor desa. Terdapat saran dari masyarakat untuk merombak keseluruhan pengurus LMDH agar lembaga tersebut terganti secara hierarki dari ketua hingga kepengurusan internal. Selain itu, terkait dukungan secara moral melalui tokoh masyarakat juga mendorong keberlangsungan lembaga tersebut.

Pada kongres kehutanan dunia dapat membawa sudut pandang baru bagi pemangku kepentingan di Indonesia, lalu program pemerintah dengan merangkul masyarakat dalam mengelola hutan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan dan terlahirnya sumber perekonomian masyarakat dan hutan yang berada di bawah kewenangan pemerintah dapat terbantu dari segi kelestarian hutan tersebut oleh masyarakat sekitar. LMDH Tani Mukti Giri Jaya menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam program tersebut, terjadinya kekosongan ketua lembaga dan

aspirasi masyarakat terhadap kantor desa untuk digelar pemilihan ketua LMDH dengan demokratis serta mempertimbangkan pihak-pihak pemangku kepentingan di Desa Mekarmanik dalam pemilihan Ketua LMDH Tani Mukti Giri Jaya. Maka dari itu, seluruh potensi kawasan hutan yang berada di kawasan Desa Mekarmanik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap menjaga nilai aturan yang telah ditetapkan oleh berbagai pihak yang terlibat.

Proses LMDH dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Kopi

Dalam meningkatkan ekonomi petani kopi, LMDH melalui beberapa proses yaitu diantaranya, *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Selain itu akan dijelaskan juga model pemberdayaan dan peran LMDH Tani Mukti Giri Jaya dalam pemberdayaan petani kopi yang di binanya.

Pertama, tahap *Enabling*. Pada tahap *enabling*, pemberdayaan dilakukan untuk menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah memberikan pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada masyarakat ataupun orang yang tidak memiliki daya apapun. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu usaha untuk menciptakan daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki setiap masyarakat dan juga usaha untuk mengembangkan potensi tersebut.

Pada tahap *enabling*, program PHBM dari Perhutani hanya menyediakan lahan hutan untuk ditanami kopi adapun terkait bibit LMDH menerima dana untuk pengadaan bibit yang nantinya bibit ini akan dibagikan kepada petani secara gratis. Beberapa jenis kopi yang dikembangkan tentunya telah bersertifikat dan lulus uji. Dari bantuan dana pemerintah daerah, LMDH Tani Mukti Giri Jaya mengembangkan jenis bibit sigararutang. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Otin selaku ketua kelompok tani kopi bersama mang Tatang selaku sekretaris LMDH Tani Mukti Giri Jaya yang menyatakan:

“sesuai dengan anjuran naskah NKK tersebut selain lahan hutan ditanami kopi oleh anggota yang tercatat harus memelihara hutannya sangkan hijau atau menanam pohon kayu keras, kayu bahan atau pun buah-buahan seperti alpukat, manggis, duren dll. Itu teh sudah dilaksanakan bahkan sebelum program turun yang di ketabui oleh LMDH sekarang sebagian besar para petani sudah mengetahui dan sadar akan hal itu dengan menggelontorkan biaya dari masing-masing petani tersebut sedangkan untuk bibit kopi itu sudah disediakan oleh pemerintah untuk dibagikan secara gratis kepada para petani. Fungsi dari menanam pohon tersebut antara lain untuk penghijauan, untuk tegakan atau untuk melindungi dari sinar matahari yang berlebihan karena pada dasarnya tanaman kopi itu ideal nya butuh sekitar 60% cahaya dari sinar matahari, kalau sudah berbuah bisa di panen untuk bahan konsumsi ataupun untuk di jual kembali dan berpengaruh juga terhadap cita rasa kopi yang nantinya akan diolah. Jadi benar benar kepengurusan LMDH dan

bawahannya atas dasar kesadaran dan kerja keras petani kopi mengejar target yang sudah ditentukan.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 oktober 2021 di kediaman bapak Otin)

Baik Perhutani maupun LMDH Tani Mukti Giri Jaya tidak menyediakan ataupun memberikan sedikitpun dana kepada para petani. Para petani secara mandiri mengupayakan modalnya secara masing-masing. Perhutani hanya menyediakan lahan hutan untuk ditanami kopi seluas 135,48 hektar sebagai tempat budidaya kopi dengan sistem bagi hasil 23,50% untuk Perhutani, 68,50% petani kopi, 6% untuk LMDH Tani Mukti Giri Jaya dan 2% untuk Desa Mekarmantik. Sesuai dengan pernyataan bapak Otin bersama mang Tatang, yaitu:

“apabila hasil panen sudah memadai berbagi hasil sharing profit ditanggihkan 23,50% petani harus berbagi hasil ke perhutani dari hasil panen sisa pengelolaan. Misalnya abah Otin hasil panen nya 1 ton terus dikurangi biaya transportasi, obat-obatan (pupuk) dan lain sebagainya terlebih dahulu sisanya baru di bagi hasil ke perhutani sebesar 23,50% hasil dari kesepakatan bersama. 23,50% tersebut bukan milik perhutani sepenuhnya tetapi ada yang kembali lagi ke lapangan. 6% untuk LMDH 2% untuk pemerintahan desa. Bahkan sisa 20% itu masih bisa turun lagi ke bawah yang kedepannya bisa berbentuk bantuan. Untuk presentasi LMDH dan KTH itu kembali lagi ke petani kadang berupa bantuan alat kadang juga berupa akomodasi perbaikan jalan perbaikan sumber air jadi kembali lagi sebenarnya ke para petani bahkan sudah mampu membuat satu mushola di tengah hutan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2021 di kediaman bapak Otin)

Jadi, cara yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat dapat berkembang yaitu dengan menyediakan lahan hutan untuk ditanami kopi dan penyediaan lahan hutan itu termasuk program dari PHBM. Dalam Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan Perum Perhutani KPH Bandung Utara dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tani Mukti Giri Jaya, pihak dari Perum Perhutani disebut sebagai pihak pertama dan LMDH Tani Mukti Giri Jaya disebut sebagai pihak ke dua. Para pihak ini akan melakukan kerjasama kemitraan kehutanan untuk pemanfaatan kawasan hutan di areal kerja pihak pertama untuk kegiatan agroforestry, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dan kegiatan lainnya sesuai dengan fungsi kawasan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLKH/SEKJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan sosial dengan lokasi kerjasama di petak 49,50,51,52,53 seluas 546,70 hektar yang berada di wilayah RPH Arcamanik BKPH Manglayang Barat KPH Bandung Utara.

Tidak hanya lahan hutan yang disediakan oleh Perhutani tetapi juga terkait bibit, LMDH menerima dana untuk mengadakan bibit yang nantinya diberikan secara gratis kepada para petani kopi. LMDH berperan penting dalam pengadaan lahan bagi masyarakat hutan.

Kedua, tahap *Empowering*. Tahap *Empowering* merupakan suatu usaha memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan melalui langkah yang nyata. Langkah tersebut menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang nantinya akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam *empowering* ini adalah meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar) termasuk juga pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti irigasi, jalan, listrik, sekolah dan pelayanan kesehatan yang dapat di jangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberadaannya sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan program khusus karena program pada umumnya tidak selalu menyentuh kepentingan setiap lapisan masyarakat.

Pada tahap pemberdayaan ini, terkait program PHBM yang dijalankan terdapat beberapa rencana jangka panjang dalam rangka memperkuat potensi sumber daya manusia, yaitu Penguatan kelembagaan LMDH, dengan diadakan beberapa pelatihan dan lain-lain, pembentukan koperasi LMDH, rehabilitasi hutan, desain rencana jasa lingkungan, peningkatan kapasitas penanganan pasca panen kegiatan budidaya/agroforestry MPTS (sortir, packaging, peningkatan nilai ekonomis, pemasaran), pengembangan usaha, dan pengamanan dan perlindungan hutan. LMDH Tani Mukti Giri Jaya tidak hanya berperan sebagai wadah tetapi juga aktif dalam menyelesaikan masalah masyarakat tani kopi dengan memberikan pelatihan, ataupun sebagai fasilitator pelatihan. Sesuai hasil wawancara dengan bersama Bapak Yadi yang menyatakan bahwa:

“para petani kopi sebenarnya sudah paham mengenai dari mulai penanaman hingga merawat tanaman kopi, hanya saja mereka belum begitu paham mengenai cara memanen kopi yang ideal. Kebanyakan petani kopi disini pada saat panen biji kopi yang masih hijau dan belum matang sempurna malah di panen padahal seharusnya biji kopi yang siap panen yaitu yang sudah berwarna merah sempurna. Para petani juga kurang memahami mengenai proses pasca panen. Oleh karena itu kami dari pihak LMDH memberikan pemahaman mengenai proses panen dan pasca panen kopi. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2021 di sekretariat LMDH)

Jadi Perhutani dan LMDH berusaha untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah yang nyata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan pengetahuan yang dimiliki oleh para petani dalam menjalankan program PHBM. Maka dengan adanya usaha memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat, program PHBM dapat dijalankan dengan baik.

Para petani kopi di Desa Mekarmanik sebetulnya sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai proses penanaman dan juga merawat tanaman kopi akan tetapi pada saat proses panen dan proses pasca panen para petani masih kurang memahaminya. Misalnya pada saat proses panen para petani kebanyakan

memanen buah cherry kopi yang belum matang atau belum berwarna merah sempurna padahal seharusnya pada saat memanen kopi harus yang benar-benar merah sempurna dikarenakan akan mempengaruhi nilai ekonomis kopi tersebut.

Pada tahap ini LMDH berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dasar para petani kopi yaitu dengan berperan sebagai wadah dan juga memberikan pelatihan ataupun fasilitator pelatihan. Bahkan hal tersebut sudah dicantumkan dalam Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) pada rencana jangka panjang yaitu meningkatkan kapasitas penanganan pasca panen kegiatan budidaya/agroforestry MPTS (sortir, packaging, peningkatan nilai ekonomis, pemasaran).

Ketiga, tahap *Protecting*. Pemberdayaan *protecting* yaitu suatu usaha untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat erat hubungannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

Pada awalnya kebanyakan petani kopi menjual hasil panennya kepada tengkulak. Petani menjual hasil panen dalam bentuk cherry yang langsung dijual dalam keadaan segar ketika telah dipanen, akan tetapi tengkulak memberikan harga yang terbilang murah dengan kisaran lima ribu per kilogram. Oleh karena itu LMDH Tani Mukti Giri Jaya berinisiatif untuk mengolah hasil panen dalam bentuk cherry tersebut menjadi green bean tujuannya agar harga jual menjadi lebih tinggi. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Yadi dan Mang Tatang yang menyatakan:

"harga jual kopi cherry yang baru saja dipanen itu terbilang cukup murah di bandingkan dengan harga kopi yang sudah melalui beberapa proses pasca panen, para petani disini menjual lima ribu per kilogramnya dalam bentuk cherry ke tengkulak. Maka dari itu kami dari pihak LMDH berinisiatif untuk memprosesnya ke dalam beberapa proses untuk dijadikan green bean. Diantaranya proses natural, wash dan honey untuk meningkatkan daya jual dari kopi tersebut." (wawancara dilakukan di sekretariat LMDH Tani Mukti Giri Jaya pada tanggal 16 Oktober 2021)

Pada tahap awal, sebagian besar petani kopi di wilayah tersebut hanya berfokus pada proses panen tanpa memperhatikan nilai tambah pasca panen. Mereka menjual hasil panen kopi dalam bentuk cherry segar langsung kepada tengkulak dengan harga yang relatif rendah, yakni sekitar lima ribu rupiah per kilogram. Kondisi ini menyebabkan petani tidak memperoleh keuntungan yang sepadan dengan usaha dan waktu yang mereka curahkan dalam proses budidaya. Ketergantungan terhadap tengkulak juga membuat posisi tawar petani menjadi lemah karena mereka tidak memiliki alternatif pasar yang lebih menguntungkan. Melihat kondisi tersebut, LMDH Tani Mukti Giri Jaya mengambil langkah strategis untuk melindungi kepentingan ekonomi para petani.

Melalui wawancara dengan Bapak Yadi dan Mang Tatang, dijelaskan bahwa LMDH berinisiatif mengolah kopi cherry menjadi green bean melalui berbagai metode seperti proses natural, washed, dan honey. Ketiga proses ini bukan hanya bertujuan meningkatkan kualitas cita rasa kopi, tetapi juga secara signifikan menaikkan nilai jual produk. Dengan diolah menjadi green bean, harga kopi dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat dibandingkan penjualan cherry segar. Upaya ini juga menjadi bentuk pemberdayaan petani agar tidak selalu bergantung pada tengkulak dan dapat memasarkan produknya secara mandiri ke pasar yang lebih luas, termasuk koperasi atau pembeli langsung dari industri kopi.

Selain meningkatkan harga jual, program yang dijalankan LMDH juga memberikan edukasi kepada petani tentang pentingnya proses pascapanen, pengeringan yang tepat, serta pemilihan biji kopi berkualitas. Petani diajak memahami bahwa proses pengolahan yang benar dapat meningkatkan daya saing kopi lokal di pasar nasional bahkan internasional. Dalam konteks ini, peran LMDH bukan hanya sebagai lembaga pengelola hutan desa, tetapi juga sebagai pelindung dan fasilitator kesejahteraan masyarakat tani. Dengan demikian, strategi protecting yang dilakukan LMDH dapat dikatakan berhasil, karena mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil panen sekaligus memperkuat kemandirian petani dalam mengelola produk mereka sendiri.

Hasil Program PHBM

Dari usaha yang dilakukan oleh LMDH dengan melalui beberapa tahap yang telah dijelaskan di atas, menghasilkan suatu hasil yang baik. Hasil yang diharapkan dari program PHBM bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlangsungan negara tentu harapan yang positif bagi seluruh aspek tersebut. Meskipun seluruh wilayah tidak dapat dipastikan menuju titik ideal untuk suatu dampak yang positif, tidak dapat dipungkiri terdapat wilayah yang mengalami dampak positif dari program PHBM. Seperti contohnya di Desa Kemiri, Kecamatan Panti melalui penelitian yang dilaksanakan oleh Puspaningrum (2011) Pelaksanaan Program PHBM di Desa Kemiri membawa dampak terhadap masyarakat desa hutan yaitu perubahan sosial masyarakat desa hutan.

Hasil nyata yang terjadi wilayah hutan di Desa Mekarmanik semenjak dimulainya program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Salah satunya peningkatan jumlah komoditas tanaman kopi di wilayah hutan tersebut. Dampak bagi masyarakat yang mengelola lahan di yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan serta dampak bagi masyarakat yang tidak mengelola lahan yaitu adanya peluang mendapatkan pekerjaan sebagai buruh yang bekerja di lahan petani kopi hutan. Perubahan ekonomi masyarakat desa hutan mengakibatkan perubahan struktur pada masyarakat desa hutan yang mengelola lahan di hutan karena dapat berpengaruh bagi seluruh elemen masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa rintangan untuk mewujudkan harapan pengelolaan hutan

bersama masyarakat karena diperlukannya pemahaman dari seluruh aspek yang berperan dalam menjaga peranan masing-masing.

Sesuai dengan pendapat Alborno, berpendapat bahwa cara-cara pengelolaan hutan yang baik dapat memberi manfaat bagi warga antara lain meningkatkan akses dan kendali warga terhadap sumber daya hutan, mendidik warga tentang hak-hak mereka atas hutan, melindungi akses hutan warga, menciptakan lingkungan pendukung untuk mengembangkan usaha dan konservasi hutan, meningkatkan pemerataan manfaat hutan bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan pasar hilir. (Alborno, 2007)

Harapan PHBM untuk menunjukkan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional, sementara harapan LMDH untuk menjadikan LMDH mandiri sebagai salah satu syarat bagi proses pembangunan berkelanjutan di sektor pengelolaan sumber daya hutan dan peningkatan taraf hidup masyarakat mendapat berbagai kendala, seperti adanya kesenjangan antara konsep dan implementasinya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong dan penghambat terwujudnya LMDH yang mandiri. Aspek tersebut bila dikaitkan dengan kondisi hutan di Desa Mekarmanik yang beberapa wilayah tertentu terdapat nilai serta fungsi antara masing-masing bagian perlu dijaga oleh seluruh pihak yang terlibat. Salah satu contohnya seperti fungsi tanaman bambu di bantaran sungai untuk menjaga kualitas sungai perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat yang memanfaatkan hutan tersebut. (Nugroho, 2011)

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa model pemberdayaan yang disimpulkan adalah model pemberdayaan berpola kemitraan. Model pemberdayaan dengan pola kemitraan ini digunakan antara Perhutani dengan LMDH Tani Mukti Giri Jaya dengan menggunakan pola PHBM secara murni. Pada pola PHBM, Perhutani hanya bisa memberikan lahan berupa hutan produksi untuk diolah oleh para petani.

Dari usaha yang dilakukan oleh LMDH dengan melalui beberapa tahap yang telah dijelaskan di atas, menghasilkan suatu hasil yang baik. Hasil yang diharapkan dari program PHBM bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlangsungan negara tentu harapan yang positif bagi seluruh aspek tersebut. Hasil nyata terjadi di wilayah hutan di Desa Mekarmanik semenjak dimulainya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Salah satunya peningkatan jumlah komoditas tanaman kopi di wilayah hutan tersebut. Dampak bagi masyarakat yang mengelola lahan di yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan serta dampak bagi masyarakat yang tidak mengelola lahan yaitu adanya peluang mendapatkan pekerjaan sebagai buruh yang bekerja di lahan petani kopi hutan. Perubahan ekonomi masyarakat desa hutan mengakibatkan perubahan struktur pada masyarakat desa hutan yang mengelola lahan di hutan karena dapat berpengaruh bagi seluruh elemen masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya

terdapat beberapa rintangan untuk mewujudkan harapan pengelolaan hutan bersama masyarakat karena diperlukannya pemahaman dari seluruh aspek yang berperan dalam menjaga peranan masing-masing.

Tidak dapat dipungkiri, hasil dari kepengurusan di masa sebelumnya LMDH berdampak terhadap keberlangsungan LMDH saat ini, karena kepengurusan LMDH terdahulu kurang fokus terhadap internal pengurus. Meskipun LMDH Tani Mukti Giri Jaya pada saat kepengurusan sebelumnya kurang aktif dalam pengembangan internal pengurus, masyarakat desa hutan tetap dipersilahkan pengelolaan lahan di kawasan perum perhutani, dengan tetap menjalankan persyaratan yang diwajibkan oleh kedua belah pihak. Dalam kelembagaan masyarakat dibutuhkan prinsip dalam pengembangan sebagai pilar menuju proses peningkatan mutu lembaga tersebut.

Selain hasil positif yang didapat, terdapat dampak negatif yang diakibatkan dari kurangnya komunikasi dan pemahaman antar pelaku di lapangan, salah satu contohnya yaitu konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Contohnya, terdapat beberapa masyarakat yang merupakan pengrajin kerajinan bambu, mereka mengambil bambu dari hutan. Lokasi tanaman bambu berada di kawasan sungai, di sisi lain terdapat petani kopi yang memperluas lahan kebun kopi untuk dijadikan lahan perkebunan kopi dengan menebang beberapa kawasan bambu.

PENUTUP

Dari hasil pemaparan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya LMDH Tani Mukti Giri Jaya dalam meningkatkan ekonomi petani kopi di Desa Mekarmanik dilakukan melalui strategi yang terencana dan berbasis pada prinsip pemberdayaan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang melibatkan kerja sama antara Perum Perhutani, LMDH, dan masyarakat sekitar hutan. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan hutan secara produktif dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pertama, strategi utama LMDH dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani adalah melalui penanaman komoditas kopi di lahan kehutanan. Pemilihan kopi bukan tanpa alasan, melainkan karena tanaman ini memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus manfaat ekologis. Akar tanaman kopi yang kuat berfungsi menahan tanah dan air sehingga dapat mencegah erosi. Dengan demikian, kopi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berperan dalam konservasi lingkungan. Melalui hasil panen kopi, masyarakat sekitar yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lahan pertanian kini dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua, melalui program PHBM, Perum Perhutani berperan dalam menyediakan lahan, sementara LMDH Tani Mukti Giri Jaya menyediakan bibit kopi secara gratis kepada masyarakat yang berminat menanam. Tidak hanya itu, LMDH juga

secara aktif memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para petani mengenai teknik budidaya kopi, perawatan tanaman, serta proses pasca panen yang bernilai tambah tinggi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petani agar mampu mengelola lahan secara mandiri dan berkelanjutan. Sebelumnya, para petani hanya menjual kopi dalam bentuk cherry segar kepada tengkulak dengan harga rendah, sekitar lima ribu rupiah per kilogram. Namun setelah adanya intervensi LMDH, hasil panen kini diolah menjadi green bean, sehingga nilai jualnya meningkat signifikan dan kesejahteraan petani pun ikut bertambah.

Ketiga, dari seluruh tahapan yang dijalankan LMDH melalui program PHBM, dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh menunjukkan dampak positif yang signifikan. Program ini tidak hanya meningkatkan jumlah komoditas kopi di wilayah hutan Desa Mekarmanik, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan melalui pekerjaan sebagai buruh tani kopi. Secara keseluruhan, program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan serta memperkuat struktur sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Adapun saran penelitian ini yaitu: (1) Bagi pihak lembaga, disarankan agar LMDH memperkuat tahap *enabling* dengan menjalin kerja sama bersama pihak swasta atau lembaga keuangan sebagai mitra pendanaan, serta membentuk koperasi petani kopi agar distribusi hasil dan keuntungan lebih merata; (2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian serupa dengan analisis yang lebih mendalam terhadap variabel ekonomi, sosial, dan ekologi, serta memperluas sumber data untuk memperkaya temuan; (3) Bagi masyarakat, diharapkan terus mendukung setiap kegiatan kelompok tani kopi dengan partisipasi aktif, menjaga semangat gotong royong, serta bersama-sama berkontribusi menuju peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa hutan.

Dengan demikian, program PHBM yang dijalankan LMDH Tani Mukti Giri Jaya terbukti tidak hanya memperkuat ekonomi masyarakat, tetapi juga menciptakan keberlanjutan antara kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2008). *Strategi Keijaksanaan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*, Jakarta: Suara Bebas.
- Albornoz, M.A., et al. (2007). *Menuju Kesejahteraan Dalam Masyarakat Hutan: Buku Panduan Untuk Pemerintah Daerah*. Bogor: Cifor.
- Arsyad, L. (1996). *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPSTIE YKPN.
- Awang, S. A. et al. (2008). *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Montpellier, France: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), dan Yogyakarta, Indonesia: PKHR Fakultas Kehutanan UGM.
- Dewi, S. (2015). *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPES.
- Dudung, A. A. (1981). *Pola Peminaan Petani dalam Kelompok Tani Satuan Pengendalian BIMAS*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Gregory, G. (1995). *Sistem-Sistem Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lexy, M. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto, T. (1993). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Ritzer, G. (2011). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soleman, B. T. (1986). *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajaawali Press.
- Soekanto, S. (2009). *Sosologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi*, Jakarta: Raja Persada.
- Soekartawi, (1996). *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: UI Pres.
- Thoha, M. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali.
- Choiria, I. dkk. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada LMDH Salam Jati Luhur KPH Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2112-2117.
- Desmawati, D. (2015). Penanggulangan Masyarakat Miskin Kota Rawan Kriminalitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dijalur Pendidikan Nonformal Di Kota Semarang. *Journal of Nonformal Education Semarang State University*, 1(1), 80-88.
- Noviati, A. Dkk. (2014). Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bangun Dalam Meningkatkan Partisipasi di Desa Donorejo. *Geo image*, 3(1), 1-7.
- Nugroho, S.S. (2011). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Melalui

J, Fitrianto, D, E, S, Amin

Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (Kajian Hukum Penguatan Kapasitas LMDH dan Peningkatan Efektifitas PHBM di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi). *Jurnal Sosial*, 12(2), 94-107.